

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- ALW, L. T. (2020). *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum)*.
- Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) dalam kerangka hak asasi manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 341–364.
- Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan, 1*.
- Atmaja, R. W. R. (2023). *Analisis yuridis kedudukan, tugas, dan fungsi komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Bernard, L. T., Simanjuntak, Y. N., Hage, M. Y., Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dicey, A. V. (2013). *The law of the constitution* (Vol. 1). OUP Oxford.
- Dina, D. M., & Zukriadi, D. (2024). PERKEMBANGAN HUKUM DI DUNIA DIGITAL: EVOLUSI HUKUM KEJAHATAN DUNIA MAYA. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(4), 73–78.
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177–199.
- Erick Tanjung, A. M. A. (2024). Peta Bahaya Kriminalisasi Jurnalis Menggunakan UU ITE dan KUHP (Policy Brief Advokasi UU ITE dan KUHP). In *Aliansi Jurnalis Independen* (p. 22).
- Fahira, Y. (2025). SISTEM CHECKS AND BALANCES DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*,

3(6).

FENOMENA, K. D., & KURNIASARI, I. F. (n.d.). *LARANGAN MENGHINA ORANG LAIN DAN*.

Fuller, L. L. (1964). *The Morality of Law*/Yale Univ. Press.

Habermas, J. (2015). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. John Wiley & Sons.

Hajati, S., Poespasari, E. D., & Moechthar, O. (2019). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Airlangga University Press.

Hartanto, H., Kurniyati, N. B., Alfariski, M. D., Rusdi, M., & Pangestika, E. Q. (2025). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam Penanggulangan Pencemaran Nama Baik. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 13–24.

Herlambang, E. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Menegakkan Disiplin Siswa Di Sekolah*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Hoetomo, M. A. (2005). Kamus lengkap bahasa indonesia. *Surabaya: Mitra Pelajar*.

Hutabarat, S. A., Praja, S. J., Suhariyanto, D., Paminto, S. R., Kusumastuti, D., Fajrina, R. M., Saragih, I. I. M., Budihartono, E., & Abas, M. (2023). *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Indonesia, K. K. N. R. (2015). *Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar.

Ismoyo, J. D., Apriyanto, A., Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Junaedi, O. (2025). Relasi Antara Moralitas Dan Hukum: Perspektif Filsafat Hukum Kontemporer. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 204–216.

Junaidi, M., Sukarna, K., & Sadono, B. (2020). Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang

- Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Kalensang, R. (2021). TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Lex Crimen*, 10(4).
- Keller, D. (2022). Lawful but awful? Control over legal speech by platforms, governments, and internet users. *U. Chi. L. Rev. Online*, 1.
- Kelsen, H. (2019). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif*. Nusamedia.
- Lolowang, C. C. (2017). *Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Penegakan Hukum Di Polres Jakarta Selatan*. Fakultas Hukum UNISSULA.
- Mahdori, M. (2023). *UJARAN KEBENCIAN SARA PADA KONTEN MEDIA SOSIAL: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK= HATE SPEECH" SARA" ON SOCIAL MEDIA CONTENT: FORENSIC LINGUISTIC STUDY*. Universitas Hasanuddin.
- Mahfud, M. D. (2010). *Membangun Politik Hukum. Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Manurung, M., Amanda, A., Al-Aziz, M., & Lubis, I. P. (2025). Negara, Agama, dan Warga Negara. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 491–509.
- Marpaung, H. W., & Sazali, H. (2025). Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts di Media Sosial. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1439–1450.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Matondang, A. M. (2025). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Cyber Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Thailand dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).
- Miskal, A. R. R., Malika, A. R., Nuruna, H., & Mumtaz, S. A. (2023). Etika Gen Z dalam Menyampaikan Preferensi Calon Presiden dan Wakil Presiden

- Indonesia 2024 di Sosial Media. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Muhammad, E. (2012). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nusantara, R. H. G., & Harahap, N. T. H. (2025). FILSAFAT HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS TEORITIS TENTANG PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKA. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(01).
- Parera, Z., & Silambi, E. D. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (hate speech) Melalui Media Sosial (di tinjau dari uu ri no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik). *Jurnal Restorative Justice*, 2(2), 160–176.
- Permana, I. M. A. S., Laksmi Dewi, A. A. S., & Karma, N. M. S. (2021). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 562–566. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4137.562-566>
- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1). <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101>
- Pierini, J. P. (2021). Gustav Radbruch's 1946 Essay "Statutory Lawlessness and Super-Statutory Law" and His Sketched Patterns for the Criminal Liability of Judges for National Socialist Crimes and German Early Courts Practice Center. *SSRN Electronic Journal*, February. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3785950>
- Purnomo, H., & Yosua, A. (2021). Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 235–251.
- Radbruch, G. (1946). Gesetzliches unrecht und übergesetzliches recht. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 5, 105–108.
- RADBRUCH, G. (n.d.). *RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM*.

- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*.
- Rahayu, S. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 43225.
- Rahmazani. (2022). PROBLEMATIKA HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DI INDONESIA Rahmazani Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. *Mimbab Hukum*, 34(1), 161–185.
- Ratnayuntika, N. P. (n.d.). *Prinsip Kepastian Hukum Penerapan Surat Keputusan Bersama Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*.
- Saragih, H., Sahari, A., & Syahbana, T. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ujaran Kebencian Melalui Transaksi Elektronik. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 119. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.267>
- Sari, R. F. (2019). Menyoal kebablasan berpendapat: Malfungsi media sosial sebagai panggung produsage konten negatif. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 1–16.
- Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. (2024). *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*. Alumni AHM-PTHM.
- Silfiah, R. I. (2020). The Implementation Of Religious Pluralism Values Of Islamic Law On Article 156a Of The Criminal Code. *Yustisia*, 9(2), 210–226.
- Silvia, L. (2021). *UPAYA DAN STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI BERITA BOHONG (HOAX) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Simamora, J. (2014). Tafsir makna negara hukum dalam perspektif undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561.
- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media*

- Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237.
- Siregar, F. S. (2023). Literasi Digital Sebagai Upaya Antisipasi Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 4(1), 68–76.
- Soekanto, S. (2003). *Metode penelitian hukum*.
- Soesilo, R., & Pidana, K. U.-U. H. (1991). Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. *Politeia, Bogor*.
- Sukma, R. C., & Agustanti, R. D. (2023). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(1), 50–66.
<https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/230%0Ahttps://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/download/230/101>
- Supiyati, S. (2020). Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran NAMA Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi. *Pamulang Law Review*, 2(1), 23– 36.
- Susanti, D. I., & Sh, M. (2021). *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Tan, K. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1), 14–29.
- Tiara, P. (2018). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/Puu-V/2007 Tentang Keberlakuan Pasal 154 Dan Pasal 155 Kuhp Terhadap Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. fakultas syariah dan hukum.
- Tuela, R. F., Antow, D. T., & Sondakh, M. (2023). Praktek Penegakan Hukum Yang Terkait Dengan Ujaran Kebencian Di Indonesia. *Lex Privatum*, XI(3), 1–13.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47306%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/download/473>

06/42102

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 44 *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 287 (2011).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1 (1945). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no--> Utrecht, E., & Djindang, M. (1962). Pengantar hukun administrasi negara Indonesia. (*No Title*).

Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & Zaidan, D. (2025). Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 924–930.

Wardhana, A. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Berdasarkan Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Widayati, L. S. (2018). Ujaran Kebencian: batasan pengertian dan larangannya. *Info Singkat*, 10(6), 1–6.

Windasuri, Heria, H. S. dan B. T. (2016). *Excellent Service*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wiratraman, H. P., & Budi, A. S. (2023). Meninjau Kembali Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Transformasi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 283–294. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.283-294>

Yulius, Y. (2019). *Diskresi Pemerintahan dalam Dimensi Hukum*.

Zaini, A. (2020). Negara hukum, demokrasi, dan ham. *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13–48.